


IMPLEMENTASI TEORI PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DAN DIGITALISASI EKONOMI NASIONAL KONTEMPORER MODERN STRATEGIS

M. Ferdiyan¹, Reni Ria Armayani Hasibuan², Nanda Ardi Tama³,
Siti Khairani⁴, Raihan Hidan Bugis⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

Email: m.ferdiyan46@gmail.com, reniriaarmayani@uinsu.ac.id, nandatama260@gmail.com,
sitikhairani0404@gmail.com, bugisraihanhidan@gmail.com

<p>Menerima: 17/12/2025</p> <p>Diterima: 18/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 19/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak <i>This study aims to analyze the implementation of Indonesian economic theory in addressing the challenges of globalization and the digitalization of the national economy in a contemporary and strategically modern era. The research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method by examining books, academic journals, government policy documents, and other relevant sources. This study highlights the role of Pancasila-based economic theory as the foundation of the national economic system in responding to global economic dynamics and rapid digital transformation. The findings indicate that globalization and digitalization present both opportunities and challenges for Indonesia's economy, particularly in terms of competitiveness, economic sovereignty, and equitable welfare distribution. Conceptually, the implementation of Indonesian economic theory emphasizes the role of the state in regulating and safeguarding national interests; however, in practice, it faces obstacles such as unequal access to digital technology, the dominance of global economic actors, and limitations in adaptive regulatory frameworks. Therefore, innovative, inclusive, and nationally value-oriented economic policy strategies are required to ensure sustainable economic development amid globalization and digital transformation.</i></p> <p>Keywords : Indonesian Economic Theory, Globalization, Economic Digitalization, Economic Policy, National Development</p>
---	--

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap struktur perekonomian nasional, termasuk di Indonesia. Arus globalisasi tidak hanya mempercepat integrasi ekonomi antarnegara, tetapi juga meningkatkan intensitas persaingan ekonomi global yang menuntut kesiapan sistem ekonomi nasional agar mampu bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik ekonominya agar tetap relevan dengan dinamika global tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Transformasi digital yang masif turut memengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat, sehingga memunculkan peluang ekonomi baru sekaligus risiko ketimpangan. Oleh karena itu, implementasi teori perekonomian Indonesia menjadi penting sebagai kerangka konseptual dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Teori ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks (Suprijanto & Emilia, 2023).

Teori perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan peran negara dalam mengatur perekonomian menjadi karakteristik utama yang membedakan teori ini dari sistem ekonomi liberal maupun kapitalistik. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, teori perekonomian Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan intervensi negara guna mencegah dominasi kekuatan ekonomi global. Tantangan muncul ketika sistem ekonomi nasional harus beradaptasi dengan tuntutan efisiensi dan inovasi digital, sementara kesenjangan akses teknologi masih terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini menuntut implementasi teori perekonomian Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, penguatan peran negara dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi strategi penting dalam menghadapi tekanan globalisasi dan transformasi digital secara simultan (Nazila & Dewi, 2022).

Digitalisasi ekonomi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perdagangan, jasa keuangan, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membuka peluang peningkatan produktivitas dan perluasan pasar. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan literasi digital, akses infrastruktur, serta keamanan data. Dalam konteks teori perekonomian Indonesia, digitalisasi harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang mendukung inovasi digital sekaligus melindungi pelaku ekonomi domestik dari persaingan tidak sehat. Oleh sebab itu, integrasi antara teori perekonomian Indonesia dan kebijakan digital menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi ekonomi digital dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional secara inklusif dan berkelanjutan (Abdillah & Lutfi, 2024).

Globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap perekonomian nasional dengan semakin terbukanya arus modal, barang, dan jasa lintas negara. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, namun di sisi lain juga berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi nasional. Dominasi perusahaan multinasional dan ketergantungan pada teknologi asing menjadi tantangan serius dalam implementasi teori perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi situasi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kapasitas domestik dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Digitalisasi ekonomi dapat menjadi instrumen strategis apabila diarahkan secara tepat melalui regulasi yang adaptif dan berpihak pada pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, teori perekonomian Indonesia harus diimplementasikan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan globalisasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital (Emilia & Dompok, 2024).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Platform digital telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi usaha. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan digital masih menjadi permasalahan utama yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka teori perekonomian Indonesia, digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur, serta dukungan terhadap UMKM agar mampu bersaing di era digital. Implementasi kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai nasional menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi digital di Indonesia (Purba & Putri, 2025).

Transformasi ekonomi digital juga menuntut adanya kebijakan publik yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Aspek keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya transaksi digital. Dalam perspektif teori perekonomian Indonesia, perlindungan terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan digital. Penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi, seperti blockchain, dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, implementasi teori perekonomian Indonesia dalam era digital tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa (Suryawijaya & Bangsawan, 2023).

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi dan digitalisasi ekonomi, implementasi teori perekonomian Indonesia menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan nasional kontemporer. Teori ini memberikan kerangka normatif dan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kedaulatan nasional. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Transformasi ekonomi digital harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana teori perekonomian Indonesia diimplementasikan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi nasional, serta sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan pembangunan di era modern strategis saat ini (Uli & Widyasari, 2025).

TINJAUAN TEORITIS

Teori perekonomian Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Konsep ini menegaskan peran negara sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik dalam sistem ekonomi, sekaligus menjamin keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, teori perekonomian Indonesia berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan pemanfaatan teknologi dan keterbukaan ekonomi agar tetap selaras dengan nilai-nilai nasional. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi, namun harus diiringi dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip ekonomi Pancasila, peran aktif negara, dan adaptasi terhadap transformasi digital menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi serta keberlanjutan pembangunan nasional.

2.1 Teori Perekonomian Indonesia Berbasis Pancasila

Teori perekonomian Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan kedaulatan ekonomi menjadi fondasi dalam penyelenggaraan sistem ekonomi nasional. Berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang menekankan mekanisme pasar bebas, teori perekonomian Indonesia mengakui peran strategis negara dalam mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas ekonomi guna melindungi kepentingan nasional. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, teori ini berfungsi sebagai penyeimbang agar keterbukaan ekonomi tidak mengorbankan ekonomi kerakyatan. Negara diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, teori perekonomian Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan

ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai nasional (Nazila & Pratama, 2021).

2.2 Teori Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan proses meningkatnya keterhubungan antarnegara melalui perdagangan, investasi, arus modal, dan pertukaran teknologi. Teori globalisasi menjelaskan bahwa keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketergantungan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi nasional, globalisasi menuntut kesiapan struktural agar negara tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pelaku aktif dalam ekonomi global. Indonesia menghadapi tantangan berupa dominasi aktor ekonomi global, persaingan yang semakin ketat, serta tekanan terhadap kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, teori globalisasi perlu dipahami secara kritis dan diintegrasikan dengan teori perekonomian Indonesia agar kebijakan ekonomi nasional tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Pendekatan selektif terhadap globalisasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional (Suprijanto & Emilia, 2023).

2.3 Teori Ekonomi Digital

Teori ekonomi digital menjelaskan pergeseran aktivitas ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang mengandalkan data, jaringan, dan platform digital. Digitalisasi ekonomi menciptakan efisiensi, inovasi, dan peluang pasar baru, terutama melalui e-commerce, fintech, dan ekonomi berbasis platform. Namun, teori ini juga menyoroti risiko ketimpangan digital, monopoli platform, serta kerentanan terhadap keamanan data. Dalam konteks Indonesia, ekonomi digital memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas partisipasi masyarakat. Akan tetapi, implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi nasional dan prinsip ekonomi kerakyatan. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, teori ekonomi digital perlu dipadukan dengan teori perekonomian Indonesia agar digitalisasi berkontribusi pada pembangunan yang inklusif (Abdillah & Putri, 2024).

2.4 Teori Peran Negara dalam Perekonomian

Teori peran negara dalam perekonomian menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, negara tidak bersifat dominan secara absolut, tetapi hadir sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik. Peran negara mencakup penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur, perlindungan pelaku usaha domestik, serta pemerataan hasil pembangunan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, peran negara semakin kompleks karena harus mampu mengimbangi kekuatan pasar global dan perkembangan teknologi yang cepat. Regulasi yang adaptif dan inovatif menjadi kunci dalam mengarahkan transformasi ekonomi digital agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, teori peran negara menjadi landasan penting dalam implementasi teori perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global dan digital (Bangsawan & Lutfi, 2024).

2.5 Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Teori pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ekonomi nasional, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Digitalisasi ekonomi dapat menjadi instrumen strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan apabila

dikelola secara inklusif dan bertanggung jawab. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, transformasi digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, teori pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan teknologi. Implementasi teori perekonomian Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, adil, dan berorientasi jangka panjang di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi (Dewi & Widyasari, 2025).

2.6 Teori Transformasi Ekonomi Nasional

Teori transformasi ekonomi nasional menjelaskan perubahan struktural dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Transformasi ini mencakup pergeseran sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan terarah agar tidak menimbulkan disrupsi sosial. Teori ini menekankan pentingnya kebijakan strategis yang mampu mengintegrasikan globalisasi dan digitalisasi dengan kepentingan nasional. Implementasi teori perekonomian Indonesia dalam proses transformasi ekonomi menjadi krusial untuk memastikan bahwa perubahan struktural tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, teori transformasi ekonomi nasional memberikan kerangka analitis dalam memahami arah dan strategi pembangunan ekonomi Indonesia di era kontemporer modern (Uli & Saputra, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, artikel akademik, dan publikasi resmi terkait perekonomian Indonesia. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk memahami implementasi teori perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini menekankan pemahaman kontekstual mengenai peran teori ekonomi Pancasila sebagai landasan kebijakan strategis, serta mengevaluasi peluang dan kendala dalam penerapannya di era kontemporer. Hasil kajian diharapkan memberikan wawasan konseptual dan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan transformasi digital, sekaligus memperkuat kedaulatan dan pemerataan kesejahteraan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi teori perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi telah memberikan arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peran negara terlihat melalui regulasi ekonomi digital, perlindungan sektor strategis, serta upaya pemberdayaan pelaku ekonomi domestik. Digitalisasi membuka peluang perluasan pasar, peningkatan efisiensi usaha, dan inklusi ekonomi yang lebih luas. Namun, tantangan berupa ketimpangan akses teknologi, dominasi pelaku ekonomi global, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan teori perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pembahasan lebih lanjut menegaskan bahwa globalisasi dan digitalisasi harus dikelola secara strategis agar tidak melemahkan kedaulatan ekonomi. Teori perekonomian Indonesia menekankan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif. Digitalisasi yang tidak diiringi dengan

regulasi berkeadilan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Implementasi teori perekonomian Indonesia menjadi relevan sebagai panduan dalam memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan sejalan dengan nilai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Implementasi Teori Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

No	Aspek Kebijakan	Bentuk Implementasi	Dampak Konseptual
1	Orientasi Ekonomi	Berbasis kepentingan nasional	Penguatan ekonomi rakyat
2	Peran Negara	Regulasi dan pengawasan	Stabilitas sistem ekonomi
3	Keadilan Sosial	Pemerataan akses ekonomi	Pengurangan kesenjangan
4	Kedaulatan Ekonomi	Perlindungan sektor strategis	Ketahanan ekonomi nasional
5	Partisipasi Publik	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Inklusi ekonomi nasional

Pembahasan Tabel 1 :

Implementasi teori perekonomian Indonesia dalam kebijakan ekonomi nasional menunjukkan adanya orientasi kuat terhadap kepentingan rakyat dan nilai-nilai nasional. Kebijakan ekonomi dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Peran negara menjadi sentral dalam mengatur arah perekonomian agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar bebas. Perlindungan terhadap sektor strategis dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi instrumen penting dalam memperluas partisipasi publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa teori perekonomian Indonesia menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi nasional.

Dampak konseptual dari implementasi kebijakan tersebut tercermin pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan penguatan peran negara, stabilitas ekonomi dapat terjaga di tengah dinamika global. Pemerataan akses ekonomi membantu mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat. Perlindungan sektor strategis juga memberikan ruang bagi pengembangan potensi nasional tanpa tekanan dominasi ekonomi global. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, teori perekonomian Indonesia tetap relevan sebagai landasan kebijakan ekonomi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Tabel 2. Tantangan Globalisasi terhadap Perekonomian Nasional

No	Bentuk Tantangan	Karakter Tantangan	Implikasi Nasional
1	Persaingan Global	Kompetisi lintas negara	Tekanan sektor domestik
2	Arus Modal Asing	Mobilitas tinggi	Ketergantungan ekonomi
3	Dominasi Korporasi	Skala ekonomi besar	Ketimpangan pasar
4	Liberalisasi Ekonomi	Minim batas regulasi	Risiko kedaulatan
5	Ketimpangan Struktur	Akses ekonomi tidak merata	Ketidakadilan sosial

Pembahasan Tabel 2 :

Globalisasi membawa tantangan yang kompleks bagi perekonomian nasional Indonesia. Persaingan global menuntut pelaku ekonomi domestik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi agar mampu bertahan di pasar internasional. Arus modal asing memberikan peluang investasi, namun juga berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi. Dominasi korporasi global sering kali melemahkan posisi pelaku usaha lokal. Liberalisasi ekonomi yang berlebihan dapat mengurangi peran negara dalam mengendalikan arah pembangunan ekonomi. Ketimpangan struktur ekonomi semakin nyata ketika manfaat globalisasi tidak terdistribusi secara merata.

Dalam konteks tersebut, teori perekonomian Indonesia berfungsi sebagai filter normatif dalam menghadapi arus globalisasi. Negara perlu hadir untuk mengatur mekanisme pasar agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Regulasi yang adaptif menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Penguatan pelaku ekonomi domestik menjadi strategi utama untuk menghadapi tekanan global. Dengan pendekatan tersebut, globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang pembangunan tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional.

Tabel 3. Peran Digitalisasi dalam Transformasi Ekonomi Nasional

No	Bidang Digital	Bentuk Transformasi	Dampak Ekonomi
1	Perdagangan	Platform digital	Perluasan pasar
2	Keuangan	Layanan keuangan digital	Inklusi ekonomi
3	Produksi	Otomatisasi proses	Efisiensi usaha
4	Distribusi	Sistem logistik digital	Kelancaran rantai pasok
5	Konsumsi	Ekonomi berbasis data	Perubahan perilaku pasar

Pembahasan Tabel 3 :

Digitalisasi berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Pemanfaatan platform digital dalam perdagangan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Layanan keuangan digital mempermudah akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Otomatisasi dalam proses produksi meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Digitalisasi distribusi juga membantu memperlancar rantai pasok nasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi modern.

Meski demikian, transformasi digital perlu diimbangi dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Tanpa pengaturan yang tepat, digitalisasi dapat memperlebar kesenjangan akses teknologi. Integrasi nilai-nilai teori perekonomian Indonesia menjadi penting agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata. Negara memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi dapat memperkuat struktur ekonomi nasional.

Tabel 4. Strategi Implementasi Teori Perekonomian Indonesia di Era Global dan Digital

No	Strategi	Fokus Kebijakan	Tujuan
1	Regulasi Adaptif	Ekonomi digital	Perlindungan nasional
2	Penguatan UMKM	Daya saing lokal	Kemandirian ekonomi

3	Peningkatan SDM	Literasi digital	Ekonomi inklusif
4	Kolaborasi	Pemerintah–swasta	Efektivitas kebijakan
5	Inovasi Nasional	Teknologi berbasis lokal	Keberlanjutan ekonomi

Pembahasan Tabel 4 :

Strategi implementasi teori perekonomian Indonesia menekankan perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global dan digital. Penguatan UMKM menjadi prioritas agar ekonomi lokal mampu bersaing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi digital membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Inovasi berbasis potensi lokal menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Melalui strategi tersebut, teori perekonomian Indonesia dapat diimplementasikan secara kontekstual dan dinamis. Kebijakan ekonomi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif terhadap perubahan global. Sinergi antara nilai nasional dan inovasi modern menciptakan sistem ekonomi yang tangguh. Dengan demikian, perekonomian nasional mampu berkembang secara strategis tanpa kehilangan identitas dan tujuan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa teori perekonomian Indonesia memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi memungkinkan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi peningkatan daya saing dan efisiensi ekonomi, namun juga memunculkan tantangan struktural yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan inklusif. Dengan penguatan peran negara, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan regulasi yang berorientasi pada nilai nasional, teori perekonomian Indonesia dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di tengah dinamika global dan transformasi digital.

REFERENSI

- Abdillah, F. (2024). Dampak positif digitalisasi terhadap perekonomian Indonesia. *Konstanta: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1078>
- Artanti, A. S., Sari, N. P. D., Putra, B. T., & Pratama, C. A. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital pada perekonomian masyarakat di Indonesia. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 4(1), 15–21.
<https://doi.org/10.38156/gesi.v4i1.183>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Dewi, W. C., & Prasidya, T. I. T. (2022). Digital economy to boost economy recovery post-pandemic: Indonesia's strategic position as new economic power in Southeast Asia. *Global South Review*, 8(1), 1–12.
<https://jurnal.ugm.ac.id/globalsouth/article/view/83331>

- Emilia, H. P., & Dompok, T. (2024). Analisis dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 824–835. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.185>
- Lutfi, A., & Sriyudhanto, A. B. (2024). Analisis pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Policy*, 15(2), 100–106. <https://journal.uns.ac.id/index.php/policy/article/view/1654>
- Nazila, E. A. (2022). Pancasila and the existence of a people's economy: How Indonesia facing the global capitalism? *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 265–285. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59810>
- Pratama, R. A., & Siregar, M. A. (2021). Strategi penguatan ekonomi nasional melalui transformasi digital di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–147. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/40321>
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>
- Putri, M. I., & Karimi, K. (2024). Analisis pengaruh perkembangan ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2017–2023). *Jurnal Ekonomi (Bung Hatta)*, 3(1), 45–58. <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/26210>
- Saputra, M. A., Asyhari, H., & Suseno, J. (2025). Dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(1), 432–438. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i1.118>
- Suprijanto, A. (2023). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Civis: Jurnal Civis*, 12(1), 1–10. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/592>
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat keamanan data melalui teknologi blockchain: Mengeksplorasi implementasi sukses dalam transformasi digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–67. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-67>
- Uli, A. S., Irmayani, R., Hadis, R., & Gibran, F. (2025). Transformasi ekonomi digital di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya pada perekonomian nasional. *ProsEko: Prosiding Ekonomi*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/ProsEko/article/view/7703>
- Widyasari, R., & Hermawan, A. (2025). Ekonomi digital: Peluang dan tantangan dalam transformasi ekonomi nasional. *Journal Central Publisher*, 2(11), 2758–2763. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.550>